



LAPORAN

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Desember 2023
Bulan Juni 2024

Berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap
Penyelenggara Pelayanan Publik
dan
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 04 Tahun 2023
tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023

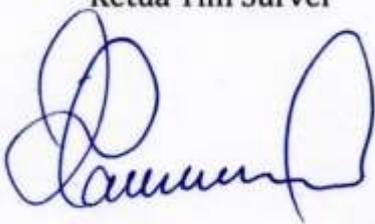


LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIMAHI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
dan
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 04 Tahun 2023

Disahkan di Cimahi
Pada Hari Kamis, 4 Juli 2024

<p>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>  <p>Dra. IPAHA LATIPAH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196502271991022001</p>	<p>Ketua Tim Survei</p>  <p>TRI LOSPALA CANDRA, S.STP Pembina Tingkat I NIP. 197708161996121002</p>
--	---

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Bulan Juni Tahun 2024. Penyelenggaraan survei ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dimana masyarakat sebagai penerima pelayanan ikut serta mengevaluasi kualitas pelayanan dengan memberikan penilaian terhadap kinerja dari unsur-unsur pelayanan dengan cara menjawab pertanyaan survei yang diberikan.

Dalam laporan ini dijelaskan mengenai proses pelaksanaan survei, pengolahan data serta analisa hasil survei yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Akhirnya kami berharap laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Bulan Juni Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi.

Cimahi, Juli 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIMAH



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GRAFIK.....	4
BAB I KUISIONER SURVEI.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Maksud Dan Tujuan.....	2
C.Landasan Hukum.....	2
D.Rencana Kerja.....	3
BAB II METODOLOGI SURVEI	4
A.Kriteria Responden.....	4
1.Tingkat pendidikan responden.....	4
2.Kelompok usia responden	5
3.Jenis Kelamin Responden	6
4.Jenis Layanan	7
B.Metode Pecacahan.....	8
C.Metode Pengolahan Data dan Analisis.....	8
BAB III PENGOLAHAN SURVEI.....	11
A.Analisis Hasil Survei	11
B.Persepsi Anti Korupsi Per Indikator	11
C.Tindak lanjut Hasil Survei.....	15
D.Kesimpulan	19
BAB IV DATA SURVEI.....	20
A. Data Lainnya	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Responden	4
Tabel 2. Usia Responden	5
Tabel 3. Jenis Kelamin Responden.....	6
Tabel 4. Jenis Pelayanan yang Diterima Responden	7
Tabel 5. Pertanyaan Utama SPAK dan Skor Jawabannya.....	9
Tabel 6. Kategori Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	10
Tabel 7. Indeks Persepsi Anti Korupsi.....	11
Tabel 8. Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan	12
Tabel 9. Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh.....	12
Tabel 10 Indeks pada Indikator Pemberian Hadiah	13
Tabel 11 Indeks pada Indikator Pemberian Imbalan.....	13
Tabel 12 Indeks pada Indikator Pungutan Liar.....	14
Tabel 13. Indeks pada Indikator Praktek Percaloan.....	14
Tabel 14. Indeks pada Indikator Praktek KKN.....	15
Tabel 15. indeks 7 indikator.....	19

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Grafik 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	6
Grafik 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Grafik 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pelayanan	7

BAB I

KUISIONER SURVEI

A. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi bertujuan untuk menemukan model praktik terbaik (*best practices*) dari unit/satuan kerja untuk mendapatkan predikat Menuju WBK/ WBBM agar dapat dijadikan contoh bagi unit/satuan kerja lain. Oleh sebab itu, fokus pembangunan ZI tertuju pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui komponen pengungkitan terhadap 7 (tujuh) area perubahan dan komponen hasil Zona Integritas melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau yang disingkat dengan DISDUKCAPIL merupakan salah satu Dinas yang memberikan pelayanan publik dibidang pencatatan data penduduk. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. DISDUKCAPIL adalah sebuah lembaga atau perangkat daerah yang menjadi pelaksana pelayanan administrasi pada bidang administrasi kependudukan, meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitik beratkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan adanya biaya di luar yang telah ditetapkan karena seluruh pelayanan Administrasi Kependudukan ini Gratis atau tidak dipungut biaya .

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan hasil pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan penyusunan laporan hasil pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

D. Rencana Kerja

1. Persiapan

Sebelum melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

a. Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

b. Penyiapan Bahan

- Kuesioner.
- Bagian dari Kuesioner/ Pengantar
- Kelengkapan peralatan.

c. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- Jumlah Responden.
- Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

d. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 7 (Tujuh) unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden dilakukan ditempat pelayanan dengan men -scan QR Code yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan .

BAB II METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

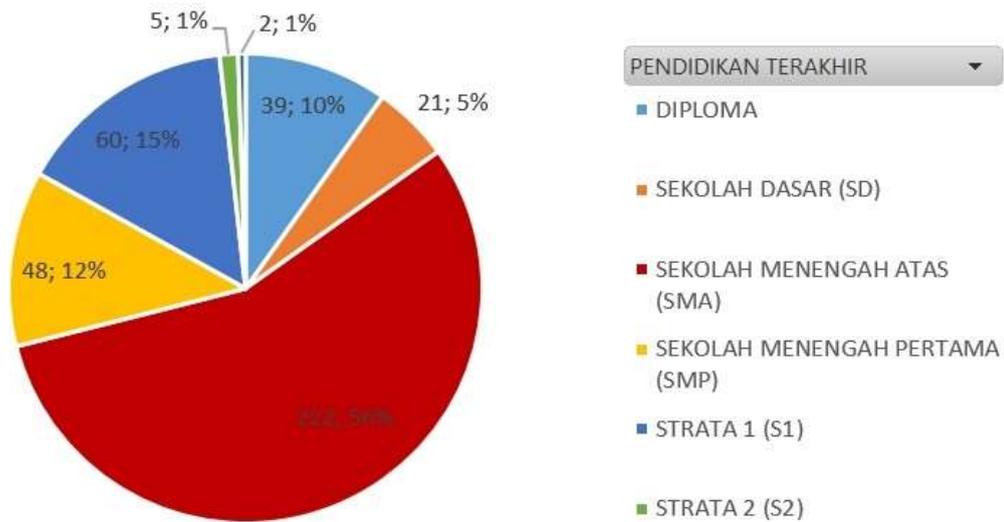
Responden dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini adalah masyarakat penerima layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Kriteria responden yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini tidak ditentukan secara khusus, hanya ditentukan rentang waktu pelaksanaannya saja. Semua pemohon pelayanan saat setelah menyelesaikan pengajuan pelayanan Luring yang membawa Handphone dan mengerti akan diminta untuk mengisi kuesioner Survei Persepsi Anti Korupsi dengan batasan pemohon pelayanan hanya bisa menjadi responden hanya satu kali selama 1 bulan pada tahun berjalan. Data yang digunakan dalam perhitungan Survei Persepsi Anti Korupsi ini adalah data hasil jawaban survei dari pemohon/responden di Bulan Juni 2024.

1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi mayoritas memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 222 atau 56 % dan S1 sebanyak 60 atau 15 %.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan	Jumlah	%
SD	21	5,5
SMP	48	12
SMA	222	56
D3	39	10
S1	60	15
S2	5	1
S3	2	0,5
Total	397	100



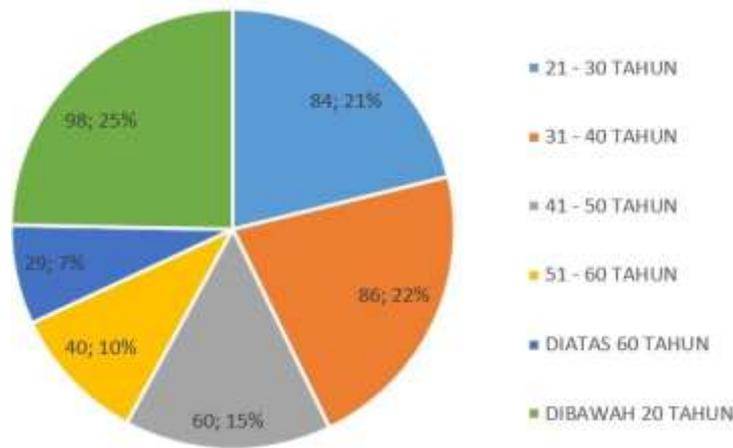
Grafik 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia remaja yaitu pada usia dibawah 20 tahun sebanyak 98 orang atau 25 %. Bagi kelompok usia di atas 60 Tahun, jumlah responden yang terendah yaitu sebanyak 29 orang atau 7 %.

Tabel 2. Usia Responden

No.	Usia	Jumlah	%
1.	< 20 ta h u n	98	25
2.	21 - 30 ta h u n	84	21
3.	31 - 40 ta h u n	86	22
4.	41 - 50 ta h u n	60	15
5.	51 - 60 ta h u n	40	10
6.	> 60 ta h u n	29	7
Jum lah		397	100



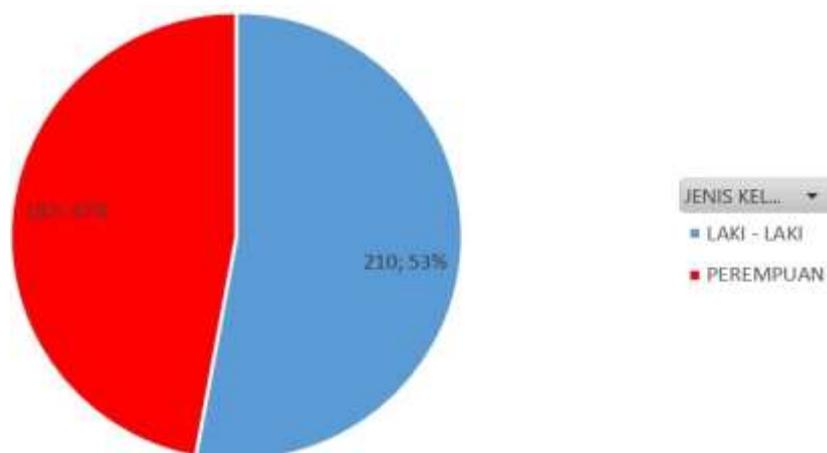
Grafik 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

3. Jenis Kelamin Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari jenis kelamin pengakses layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi jumlah laki-laki sebanyak 99 orang atau 52 % dan perempuan sebanyak 91 orang atau 48 %, yang artinya jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan tetapi selisihnya tidak jauh berbeda.

Tabel 3. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Laki-Laki	210	53
Perempuan	187	47
Jumlah	397	100



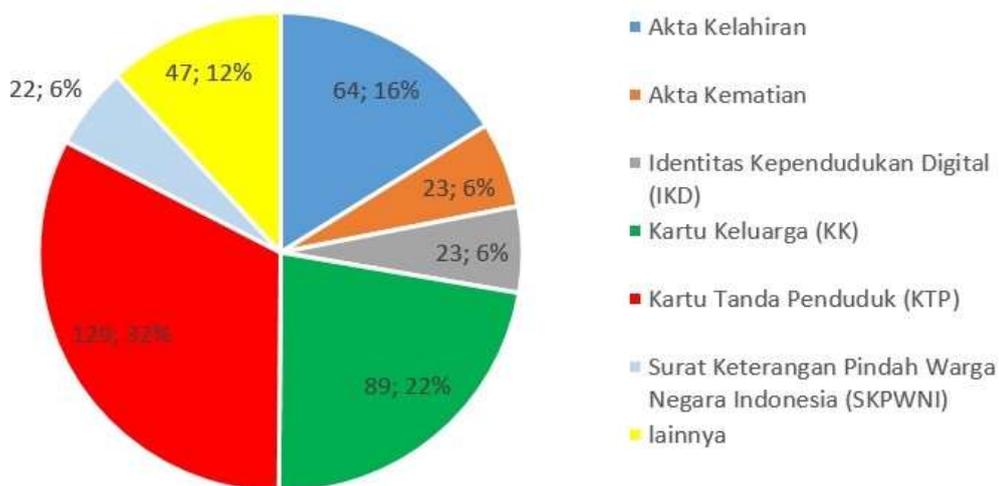
Grafik 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

4. Jenis Layanan

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi berdasarkan Jenis Layanan, menunjukkan bahwa mayoritas jenis layanan yang dilakukan Responden adalah Pelayanan KTP sebanyak 61 orang atau 32 % dan Kartu Keluarga sebanyak 52 orang atau 27%.

Tabel 4. Jenis Pelayanan yang Diterima Responden

Jenis Pelayanan	Jumlah	%
KTP	129	32
KK	89	22
IKD	23	6
Keterangan Pindah	22	6
Akte Kelahiran	64	16
Akte Kematian	23	6
Lainnya	47	12
Total	397	100



Grafik 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pelayanan

B. Metode Pecacahan

1. Sampel

Data survei diambil menggunakan Barcode /QRcode dengan alamat link

[https:// docs.google.com/ forms/ d/ 1Fs77QLfIA_qVloCsZaJenLcCx6Hz](https://docs.google.com/forms/d/1Fs77QLfIA_qVloCsZaJenLcCx6Hz0Pg5ORUpbGL_RCg/edit)

[0Pg5ORUpbGL_RCg/edit](https://docs.google.com/forms/d/1Fs77QLfIA_qVloCsZaJenLcCx6Hz0Pg5ORUpbGL_RCg/edit) . Responden merupakan masyarakat yang telah menerima layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi .

2. Variabel pengukuran

- a. Manipulasi Peraturan
- b. Menjual Pengaruh
- c. Pemberian Hadiah
- d. Penyalahgunaan Jabatan / Pungutan Liar
- e. Transaksi Rahasia
- f. Praktek Percaloan
- g. Praktek KKN

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Dalam pelaksanaan survei ini data yang diperoleh dari pengisian survei pada Ketujuh unsur tersebut diatas, selanjutnya disusun kedalam kuesioner dengan 7 item/indikator, dengan empat opsi jawaban. Adapun skor/penilaiannya menggunakan skala Likert, yaitu skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang terhadap suatu jenis layanan publik. Tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan atau jawaban atas pertanyaan diberi skor 1 sampai dengan 4. Pertanyaan utama dan pilihan jawabannya serta konversi skornya ditampilkan pada tabel di bawah ini .

Tabel 5. Pertanyaan Utama SPAK dan Skor Jawabannya

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN	SKOR JAWABAN			
			1	2	3	4
1.	Manipulasi Peraturan	Apakah pem berian layan an layan an di persu lit oleh petu gas den gan maksu d terten tu ?	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
2.	Menjual Pengaruh	Apakah pegawai Disdukcapil menghubungi Bapak / Ibu / Sdr(i) yang menawarkan akan membantu dalam pengurusan dokumen kependudukan?	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
3.	Pemberian Hadiah	Apakah Bapak / Ibu/ Sdr(i) memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima walaupun tidak di minta?	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
4.	Penyalah gu naan Jabatan / Pu ngli	Apakah pegawai Disdukcapil meminta imbalan berupa uang/ barang dalam memberikan pelayanan?	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
5.	Transaksi Rahasia	Apakah Bapak / Ibu/ Sdr(i) pernah m en gu ru s Doku m en Kependu du kan kepada pegawai Disdu kcapil di lu ar kantor atas permintaan petu gas?	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
6.	Praktek Percaloan	Apakah Pegawai Disdukcapil melakukan praktik Percaloan / Perantara / Biro jasa dalam memberikan pelayanan?	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
7.	Praktek KKN	Apakah Bapak/ Ibu/ Sdr(i) pernah melihat dan atau mendengar masih adanya Praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di Disdukcapil?	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Nilai penimbang setiap unsur pelayanan dalam survei kepuasan masyarakat sama dengan menggunakan rumus :

$$B^a \setminus b^a \setminus t n^a \setminus l a^a \setminus V rata - rata t^a \setminus R r t^a \setminus V m b a n g = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai tertim bang

Untuk memperoleh nilai SPAK digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus :

$$SPAK = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Rata-rata Tertimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SPAK yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus :

$$SPAK = \text{Nilai layanan} \times 25$$

Sehingga diperoleh kategorisasi mutu pelayanan di Disdukcapil Kota Cimahi ditentukan sebagai berikut:

Tabel 6. Kategori Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

No	Mutu Pelayanan (Kinerja Unit Pelayanan)	Nilai		
		Interval Konversi	Interval	Persepsi
1.	A (Bersih dari Korupsi)	88,31 - 100,00	3,5324 - 4,00	4
2.	B (Cukup Bersih dari Korupsi)	76,61 - 88,30	3,0644 - 3,532	3
3.	C (Kurang Bersih dari Korupsi)	65,00 - 76,00	2,60 - 3,064	2
4.	D (Tidak Bersih dari Korupsi)	25,00 - 64,99	1,00 - 2,5996	1

BAB III PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

Sampai batas waktu yang ditetapkan (30 Juni 2024), responden yang mengisi survei sebanyak 397 yang terdiri dari berbagai kalangan yang telah selesai mendapat pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.

Berdasarkan hasil analisis data hasil survei maka Persepsi Anti Korupsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Dari 7 indikator Persepsi Anti Korupsi, diperoleh hasil sebesar 3,955. Indeks 3,955 atau 98,875 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 88,31 - 100.00.

Tabel 7. Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Ruang Lingkup	IPK	Konversi	Kategori	Ranking
1.	Manipulasi Peraturan	3,950	98,750	A	5
2.	Menjual Pengaruh	3,887	97,175	A	7
3.	Pemberian Hadiah	3,929	98,225	A	6
4.	Penyalahgunaan Jabatan / Pungutan Liar	3,992	99,800	A	1
5.	Transaksi Rahasia	3,990	99,750	A	2
6.	Praktek Percaloan	3,982	99,550	A	3
7.	Praktek KKN	3.957	98,925	A	4
TOTAL		3,9 55	98,875	A	

B. Persepsi Anti Korupsi Per Indikator

Hasil IPK di atas, terdiri dari akumulasi penilaian pada tujuh unsur indikator, selanjutnya pada bagian ini disajikan analisis terhadap masing-masing ke tujuh unsur item/indikator yakni sebagai berikut :

1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,950 atau 98,750. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Disdukcapil Kota Cimahi Bersih dari Korupsi.

Tabel 8. Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			f	Skor Total	%
1.	Selalu	1	1	1	0,2
2.	Sering	2	0	0	0
3.	Jarang	3	17	51	4,3
4.	Tidak Ada	4	379	1.516	95,5
Jumlah			397	1.568	100
IPAK			3,950 / 98,750		

2. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,887 atau 97,175. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Disdukcapil Kota Cimahi Bersih dari Korupsi.

Tabel 9. Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			f	Skor Total	%
1.	Selalu	1	9	9	2,3
2.	Sering	2	3	12	0,7
3.	Jarang	3	12	36	3
4.	Tidak Ada	4	373	1.492	94
Jumlah			397	1.549	100
IPAK			3,887 / 97,175		

3. Indikator Pemberian Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pemberian Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,929 atau 98,225. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Disdukcapil Kota Cimahi Bersih dari Korupsi.

Tabel 10 Indeks pada Indikator Pemberian Hadiah

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			f	Skor Total	%
1.	Selalu	1	4	4	1
2.	Sering	2	0	0	0
3.	Jarang	3	16	48	4
4.	Tidak Ada	4	377	1.508	95
Jumlah			397	1.560	100
IPAK			3,929 / 98,225		

4. Indikator Penyalahgunaan Jabatan / Pungutan Liar

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan / Pungutan Liar ini menunjukkan hasil pada indeks 3,992 atau 99,800. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Disdukcapil Kota Cimahi Bersih dari Korupsi.

Tabel 11 Indeks pada Indikator Pemberian Imbalan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			f	Skor Total	%
1.	Selalu	1	0	0	0
2.	Sering	2	0	0	0
3.	Jarang	3	3	9	1
4.	Tidak Ada	4	394	1.576	99
Jumlah			387	1.585	100
IPAK			3,992 / 99,800		

5. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 3,990 atau 99,750. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Disdukcapil Kota Cimahi Bersih dari Korupsi.

Tabel 12 Indeks pada Indikator Pungutan Liar

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			f	Skor Total	%
1.	Selalu	1	0	0	0
2.	Sering	2	0	0	0
3.	Jarang	3	4	12	1
4.	Tidak Ada	4	393	1.572	99
Jumlah			397	1.584	100
IPAK			3,990 / 99,750		

6. Indikator Praktek Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Praktek Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,982 atau 99,550. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Disdukcapil Kota Cimahi Bersih dari Korupsi.

Tabel 13. Indeks pada Indikator Praktek Percaloan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			f	Skor Total	%
1.	Selalu	1	0	0	0
2.	Sering	2	1	2	0,2
3.	Jarang	3	5	15	1,3
4.	Tidak Ada	4	391	1.564	98,5
Jumlah			397	1.581	100
IPAK			3,982 / 99,550		

7. Indikator Praktek KKN

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Praktek KKN ini menunjukkan hasil pada indeks 3,957 atau 98,925 . Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Disdukcapil Kota Cimahi Bersih dari Korupsi.

Tabel 14. Indeks pada Indikator Praktek KKN

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			f	Skor Total	%
1.	Selalu	1	0	0	0
2.	Sering	2	1	2	0,2
3.	Jarang	3	15	45	3,8
4.	Tidak Ada	4	381	1.524	96
Jumlah			397	1.571	100
IPAK			3,957 / 98,925		

C. Tindak lanjut Hasil Survei

Hasil Indeks Persepsi Koreksi per Indikator diatas , terdiri dari akumulasi penilaian pada tujuh unsur indikator, selanjutnya pada bagian ini disajikan analisis terhadap masing-masing ke tujuh unsur item/ indikator yakni sebagai berikut :

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu						Penanggung Jawab
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	
1.	Indikator Manipulasi Peraturan	Melakukan upaya pencegahan dengan melakukan monev internal dalam rangka pendeteksian manipulasi peraturan secara berkelanjutan .	√	√	√	√	√	√	
		Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam mendapatkan pelayanan yang bebas dari manipulasi peraturan .	√	√	√	√	√	√	
2.	Indikator Menjual Pengaruh	Pencegahan dengan melakukan pengawasan oleh Manager Pelayanan dan Petugas Front Office secara Berkelanjutan .	√	√	√	√	√	√	
		Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak mengenai standar pelayanan baik secara langsung maupun online melalui media	√	√	√	√	√	√	

		sosial .							
3.	Indikator Pemberian Hadiah	Edukasi kepada pegawai tentang pentingnya integritas dan menghindari praktik pemberian hadiah .	√	√	√	√	√	√	
		Sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam mendapatkan pelayanan yang bebas dari praktik pemberian hadiah .	√	√	√	√	√	√	
4.	Indikator Penyalahgunaan Jabatan / Pungutan Liar	Edukasi kepada pegawai tentang pentingnya integritas dan menghindari praktik pemberian imbalan .	√	√	√	√	√	√	
		Sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam mendapatkan pelayanan yang bebas dari praktik pemberian imbalan .	√	√	√	√	√	√	
5.	Indikator Transaksi Rahasia	Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pegawai untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme	√	√	√	√	√	√	

		Disdukcapil Kota Cimahi perlu mempertahankan capaian positif ini dengan terus meningkatkan upaya pencegahan korupsi.	√	√	√	√	√	√	
6.	Indikator Praktek Percaloan	Upaya pencegahan dan pendeteksian percaloan secara berkelanjutan.	√	√	√	√	√	√	
		Edukasi kepada pegawai tentang pentingnya integritas dan menghindari praktik percaloan	√	√	√	√	√	√	
7.	Indikator Praktek KKN	Memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah terjadinya praktik KKN.	√	√	√	√	√	√	
		Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem dan prosedur yang ada untuk mengidentifikasi potensi kelemahan.	√	√	√	√	√	√	

D. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi diperoleh hasil bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,955 atau 98,875 masuk pada kategori Bersih dari Korupsi. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Bulan Juni 2024 ini mengalami penurunan dibandingkan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Bulan Mei 2024 yang memiliki nilai 3,964 atau 99,098.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 7 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

Tabel 15. indeks 7 indikator

No	Ruang Lingkup	IPK	Konversi	Kategori	Ranking
1.	Manipulasi Peraturan	3,950	98,750	A	5
2.	Menjual Pengaruh	3,887	97,175	A	7
3.	Pemberian Hadiah	3,929	98,225	A	6
4.	Penyalahgunaan Jabatan / Pungutan Liar	3,992	99,800	A	1
5.	Transaksi Rahasia	3,990	99,750	A	2
6.	Praktek Percaloan	3,982	99,550	A	3
7.	Praktek KKN	3,957	98,925	A	4
TOTAL		3,955	98,875	A	

BAB IV

DATA SURVEI

A. Data Lainnya

1. Daftar pertanyaan survei persepsi anti korupsi

1. Apakah pemberian layanan layanan di persulit oleh petugas dengan maksud tertentu? (Manipulasi peraturan)

- SELALU
- SERING
- JARANG
- TIDAK ADA

2. Apakah pegawai Disdukcapil menghubungi Bapak/Ibu/Sdr(i) yang menawarkan akan membantu dalam pengurusan dokumen kependudukan? (Menjual pengaruh)

- SELALU
- SERING
- JARANG
- TIDAK ADA

3. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima walaupun tidak di minta? (Pemberian Hadiah)

- SELALU
- SERING
- JARANG
- TIDAK ADA

4. Apakah pegawai Disdukcapil meminta imbalan berupa uang/barang dalam memberikan pelayanan? (Penyalahgunaan Jabatan/Pungli)

- SELALU
- SERING
- JARANG
- TIDAK ADA

5. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) pernah mengurus Dokumen Kependudukan kepada pegawai Disdukcapil di luar kantor atas permintaan petugas? (Transaksi Rahasia)

- SELALU
- SERING
- JARANG
- TIDAK ADA

6. Apakah Pegawai Disdukcapil melakukan praktik Percaloan/Perantara/Biro jasa dalam memberikan pelayanan? (Praktek Percaloan)

- SELALU
- SERING
- JARANG
- TIDAK ADA

7. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) pernah melihat dan atau mendengar masih adanya Praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di Disdukcapil? (Perbuatan Curang)

- SELALU
- SERING
- JARANG
- TIDAK ADA

4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4
4	3	4	4	4	4	4
4	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
1568	1543	1560	1585	1584	1581	1571
397	397	397	397	397	397	397
3,94962217	3,88664987	3,92947103	3,99244332	3,98992443	3,98236776	3,95717884
3,95	3,887	3,929	3,992	3,99	3,982	3,957
25	25	25	25	25	25	25
98,75	97,175	98,225	99,8	99,75	99,55	98,925
IPAK					3,955	
KONVERSI					98,875	
PREDIKAT					A (SANGAT BAIK)	

